



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
: KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NATALIA
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 237757

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	250.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI	Rp. 250.000.000	
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	5.000.000
1. MOTOR, HONDA AFX12U21C08M/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI	Rp. 5.000.000	
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	137.744.285
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	392.744.285

III. HUTANG **Rp.** **116.740.483**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **276.003.802**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
: KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI WIDIYANTI
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 101907

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	223.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 12 m2/10 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA, HASIL SENDIRI	Rp.	223.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	95.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI	Rp.	90.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI	Rp.	5.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	51.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	41.265.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	410.265.000
III. HUTANG	Rp.	273.175.493
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	137.089.507

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
: KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PUNGKY HERLAMBAANG
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 866662

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	300.200.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA BITUNG , HASIL SENDIRI Rp. 150.100.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BITUNG , HASIL SENDIRI Rp. 150.100.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	122.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 122.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	22.699.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	20.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	464.899.000
III. HUTANG	Rp.	387.293.810
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	77.605.190

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIT KERJA : KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ODORITA NAIBAHO
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 692818

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 290.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/80 m2 di KOTA BITUNG ,
HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/72 m2 di KOTA BITUNG ,
HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 73.700.000

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA GX Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
72.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL GT Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 1.700.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 81.900.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 152.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 597.600.000

III. HUTANG Rp. 200.710.942

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 396.889.058

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
: KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JEAN LOUISJE HENRIETE ROTINSULU
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
3. NHK : 672228

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	13.500.000
1. MOTOR, YAMAHA 54P (CAST WHEEL) A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA UE11 (CAST WHEEL) Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	12.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.768.120
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	36.268.120

III. HUTANG Rp. 111.229.918

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -74.961.798

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.